



The Separation of Personal and Business Finances: Accounting Implications for Financial Stability and Transparency in MSMEs in Cipayung District, Depok City

**Muhamad Aghil Hanafi ^{*1}, Sasi Ngatiningrum², Astri Arnesia³
Istiqomah Nur Hasanah⁴, Nofryanti⁵**

* muhamadagiel7@gmail.com

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

² Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

³ Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

⁴ Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

⁵ Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the importance of separating personal and business finances and its implications for financial stability and transparency among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Cipayung District, Depok City. The primary issue faced by MSME owners is a low understanding of basic accounting practices, particularly in segregating personal and business transactions, which leads to inaccurate financial reporting and difficulties in business decision-making. Methodology: This research employed a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation involving MSME owners. Findings: The results indicate that most business owners still mix personal and business finances, resulting in a lack of transparency, difficulty in measuring business performance, and limited access to external funding sources. Financial separation is proven to have positive implications for more systematic financial reporting, increased accountability, and ease of business performance evaluation. Furthermore, the implementation of accounting practices, such as separate transaction recording, the use of dedicated business bank accounts, and the preparation of basic financial statements, can enhance financial stability and external trust. Conclusion: Therefore, continuous education and assistance are required for MSME owners to improve accounting literacy, enabling them to consistently apply financial separation to support business sustainability and growth.

Keywords: *Accounting; Financial Separation; Financial Stability; Transparency; MSMEs.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat potensial dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan yang kurang terstruktur, khususnya dalam hal pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampuradukkan transaksi keuangan pribadi dengan bisnis, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencatatan, pelaporan keuangan yang tidak akurat, dan berujung pada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan menurunkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pelanggan dan lembaga keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini dirancang dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang mudah di fahami namun efektif. Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku UMKM akan dibekali dengan kemampuan untuk membuka rekening usaha terpisah, melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, dan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Selain itu, pengenalan dan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan digital yang mudah diakses juga menjadi bagian penting agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menekankan pentingnya disiplin dalam evaluasi keuangan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, sehingga pelaku UMKM dapat memantau kondisi keuangan usahanya secara berkala dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Peningkatan kesadaran akan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan juga menjadi fokus utama melalui workshop dan sosialisasi, yang diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM sehingga mereka memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi untuk membangun kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Kegiatan ini juga memfasilitasi akses pelaku UMKM kepada lembaga keuangan formal dengan memanfaatkan laporan keuangan yang telah disusun secara rapi sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Sebagai pelengkap, pelaku UMKM akan dibimbing untuk membuat sistem dokumentasi transaksi yang terorganisir, termasuk pengarsipan bukti transaksi seperti kwitansi dan struk belanja. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk mendukung audit internal dan eksternal serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Luaran dari kegiatan ini diharapkan berupa peningkatan jumlah UMKM yang memiliki rekening usaha terpisah, kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana, penggunaan aplikasi keuangan digital, frekuensi evaluasi keuangan yang rutin, serta peningkatan akses pembiayaan formal. Berdasarkan hasil riset dan pengalaman tim pengusul, penerapan solusi ini telah terbukti mampu meningkatkan stabilitas finansial dan daya saing UMKM secara signifikan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM di Kecamatan Cipayung, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan usaha yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap sarana dan prasana untuk meningkatkan perekonomian bangsa dimana seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, kebutuhan manusia saat ini semakin meningkat dan perekonomian terus mengalami pertumbuhan dan perubahan. UMKM menjadi tonggak kehidupan dan perekonomian bangsa karena melalui kegiatan bisnis ini banyak tenaga kerja yang dapat terserap. Kegiatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat telah membuka banyak lapangan pekerjaan baru serta dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk terus mengasah kemampuannya dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi diri maupun potensi alam dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut sebaikbaiknya. Walaupun keberadaan UMKM saat ini masih dipandang sebelah mata seperti halnya perusahaan-perusahaan besar akan tetapi secara tidak langsung hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa dan menurunkan angka kemiskinan. kualitas UMKM yang sepadan.

Permasalahan khas yang dihadapi adalah terbatasnya kemampuan memahami pasar,

kurangnya pengetahuan tentang karakteristik produk yang dibutuhkan pasar, kurangnya pengetahuan tentang aturan masuk pasar, dan pengetahuan tentang persaingan dagang yang masih minim. Permasalahan yang dihadapi UMKM sangat mempengaruhi kinerja keuangannya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM agar tidak bangkrut.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian suatu perusahaan selama suatu periode waktu yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan merupakan pencapaian atau hasil pengelolaan aset secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan keuangan yang maksimal dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan sehingga UMKM dapat memperoleh penghasilan optimal dan keunggulan kompetitif. Semua hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Yuliati (2022) yang menyatakan bahwa kemampuan usaha dalam menyusun laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Laporan keuangan menggambarkan aktivitas organisasi selama periode waktu tertentu sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Transparansi juga penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini dapat memastikan bahwa seluruh data bisnis dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Akuntabilitas juga menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menunjukkan kinerjanya yang baik sehingga membentuk suatu sistem yang saling mengontrol dan saling mengawasi.

UMKM memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Berubahnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercermin dari jumlah unit usaha dan wirausaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. Meningkatnya pertumbuhan UMKM secara kuantitas belum dibarengi dengan peningkatan.

Kecamatan Cipayung merupakan salah satu wilayah yang berada di Kota Depok, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang dinamis. Berdasarkan data demografis, jumlah penduduk di Kecamatan Cipayung, Kota Depok mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk meningkat dari sekitar 150.156 jiwa menjadi 162.275 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,42% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan berbagai tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Kami melakukan persiapan segala hal yang terkait dengan materi, bahan dan alat sesuai dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan mudah dimengerti serta dipahami oleh Masyarakat pada Kecamatan Cipayung Untuk melaksanakan program PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :

Prosedur Kerja

Tahap Persiapan

Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan program. Pada tahap ini, kami akan melakukan beberapa kegiatan penting, yaitu:

- a) Survei lapangan dan identifikasi kebutuhan UMKM

Tim akan melakukan kunjungan lapangan untuk memahami kondisi UMKM di Kecamatan Cipayung. Kegiatan survei ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif terkait praktik pemisahan laporan keuangan pada UMKM, permasalahan

dalam pemisahan transaksi keuangan pribadi dan usaha, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing pelaku UMKM.

Metode yang digunakan dalam survei ini meliputi wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemahaman dan praktik pengelolaan keuangan, sedangkan observasi bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pencatatan dan pengelolaan keuangan yang diterapkan.

Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM, seperti rendahnya pemahaman mengenai pemisahan transaksi pribadi dan transaksi usaha, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan secara sistematis.

Hasil dari survei ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

- b) Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, tim akan menyusun modul pelatihan yang bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Adapun materi yang akan dimuat dalam modul pelatihan meliputi:

1. Laporan Keuangan UMKM

Laporan keuangan merupakan dokumen resmi yang mencatat dan menyajikan aktivitas keuangan UMKM. Keberadaan laporan keuangan sangat penting karena dapat memberikan gambaran kondisi keuangan usaha, membantu dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan juga berperan dalam mempermudah akses UMKM terhadap sumber pendanaan atau penambahan modal usaha.

2. Akses Penambahan Modal

Pemahaman mengenai prosedur memperoleh tambahan modal menjadi hal yang krusial bagi UMKM. Dengan akses terhadap modal yang memadai, pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan pasar secara lebih optimal.

3. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi difokuskan pada pengenalan sistem pencatatan yang memisahkan transaksi pribadi dan transaksi usaha. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan relevan.

Modul pelatihan ini akan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat diikuti oleh pelaku UMKM dengan berbagai latar belakang pendidikan. Selain itu, setiap materi akan dilengkapi dengan studi kasus nyata dari UMKM yang telah berhasil mengelola keuangan dan aset usahanya secara efektif.

- c) Koordinasi dengan Pemerintah dan pihak terkait

Agar program penelitian dan pendampingan terkait pemisahan keuangan pribadi dan usaha dapat berjalan dengan optimal, tim akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Cipayung serta dinas terkait untuk memperoleh dukungan administratif, data UMKM, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk menyinergikan program dengan kebijakan pembinaan UMKM, khususnya dalam peningkatan stabilitas dan transparansi finansial melalui penerapan praktik akuntansi yang baik.

Tim juga akan mengupayakan kerja sama dengan lembaga keuangan guna membuka akses pembiayaan bagi UMKM. Hal ini penting agar UMKM yang telah menerapkan pemisahan keuangan dan memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dapat lebih mudah memperoleh kepercayaan dalam pengajuan modal usaha..

Tahap Pelatihan

Pelatihan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai dasar dalam menciptakan stabilitas dan transparansi finansial. Kegiatan pelatihan diselenggarakan dalam bentuk lokakarya dan diskusi interaktif dengan pendekatan aplikatif.

Adapun rincian kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

- c) **Pelatihan Pemisahan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan**
Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta praktik penyusunan laporan keuangan bagi UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
- d) **Pelatihan Penggunaan Aplikasi Laporan Keuangan**
Peserta akan diberikan pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan untuk mempermudah pemisahan transaksi keuangan pribadi dan usaha, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tertib, dan transparan.
- e) **Pelatihan Akses Permodalan dan Prosedur Pengajuan Modal**
Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai cara memperoleh penambahan modal dari lembaga keuangan, serta pentingnya laporan keuangan yang terpisah dan sesuai standar sebagai syarat utama dalam pengajuan pembiayaan.
- f) **Pendampingan Prosedur Pengajuan Modal kepada Pihak Ketiga**
- g) **Tim akan memberikan panduan terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan penambahan modal kepada pihak ketiga, dengan menekankan peran laporan keuangan yang transparan dan terstruktur dalam meningkatkan kredibilitas usaha.**

Tahap Pendampingan Implementasi

Setelah pelatihan selesai, tim akan memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM untuk memastikan penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta optimalisasi laporan keuangan dalam mendukung stabilitas dan transparansi finansial. Pendampingan ini bertujuan agar peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam kegiatan operasional sehari-hari, sekaligus meningkatkan kesiapan dalam mengakses penambahan modal.

Beberapa aktivitas pendampingan meliputi:

- a) **Bantuan teknis pembuatan laporan keuangan**
Tim akan mendampingi UMKM dalam menganalisis dan menerapkan pemisahan keuangan antara pribadi dan usaha, serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Selain itu, pelaku UMKM juga akan dibimbing dalam penggunaan aplikasi pencatatan keuangan yang telah diperkenalkan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih tertib, akurat, dan transparan.
- b) **Pelatihan memperoleh penambahan modal**
Tim akan memberikan pendampingan dalam memperoleh penambahan modal dari pihak perbankan, termasuk pemberian referensi bank, penyusunan dokumen, serta pemenuhan prosedur pengajuan kredit. Penekanan diberikan pada pentingnya laporan keuangan yang telah dipisahkan dan disusun secara sistematis sebagai dasar dalam meningkatkan

kredibilitas dan kepercayaan dari pihak pemberi dana.

Tahap Evaluasi dan Monitoring Berkala

Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengukur keberhasilan program serta memastikan bahwa penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha yang diikuti dengan penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan stabilitas dan transparansi finansial UMKM.

a) Evaluasi Pemahaman dan Implementasi

Evaluasi awal dilakukan segera setelah pelatihan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Selanjutnya, evaluasi lanjutan dilakukan tiga bulan setelah pelatihan untuk menilai implementasi praktik tersebut dalam kegiatan usaha. Penilaian mencakup pemisahan pencatatan keuangan, keteraturan penyusunan laporan keuangan, penggunaan aplikasi pencatatan, serta dampaknya terhadap transparansi dan stabilitas finansial, termasuk kemudahan dalam mengakses penambahan modal.

b) Monitoring Berkala

Monitoring dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tim akan membandingkan kondisi keuangan UMKM sebelum dan sesudah program untuk melihat dampak terhadap peningkatan transparansi dan stabilitas finansial.

Selain itu, tim juga akan memberikan masukan dan solusi bagi UMKM yang masih menghadapi kendala dalam menerapkan pemisahan keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara optimal, sehingga tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tahap Dokumentasi dan Publikasi

Tahap akhir ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses kegiatan, hasil, serta dampak dari penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha pada UMKM. Dokumentasi ini menjadi dasar evaluasi sekaligus referensi untuk pengembangan program serupa dalam meningkatkan stabilitas dan transparansi finansial UMKM di masa mendatang.

a) Penyusunan Laporan Akhir

Laporan akhir disusun berdasarkan hasil pelatihan, pendampingan, serta evaluasi yang telah dilakukan. Laporan ini akan memuat analisis mengenai penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, kualitas penyusunan laporan keuangan, serta implikasinya terhadap peningkatan stabilitas dan transparansi finansial UMKM. Selain itu, laporan juga akan dilengkapi dengan rekomendasi untuk pengembangan praktik akuntansi yang lebih baik di masa depan.

b) Publikasi

Hasil kegiatan akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku panduan, maupun presentasi pada forum akademik atau bisnis. Publikasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian mengenai implikasi pemisahan keuangan pribadi dan usaha terhadap stabilitas dan transparansi finansial UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program ini, partisipasi mitra sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan, khususnya dalam penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. Mitra dalam program ini meliputi pemerintah kecamatan dan kelurahan, pelaku UMKM, serta lembaga keuangan dan penyedia teknologi yang relevan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini bersifat kooperatif, terutama dalam memberikan izin pelaksanaan kegiatan, dukungan administratif, serta penyediaan data dan informasi terkait kondisi UMKM di wilayah Kecamatan Cipayung. Selain

itu, pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang terpisah dan sesuai prinsip akuntansi.

Pelaku UMKM merupakan mitra utama dalam program ini. Partisipasi aktif dari UMKM sangat penting dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan. Keterlibatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam menerapkan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan transparansi finansial.

Selain itu, partisipasi lembaga keuangan dan penyedia teknologi juga sangat diperlukan. Penyedia teknologi berperan dalam memberikan akses terhadap aplikasi pencatatan keuangan yang mudah dan terjangkau, sehingga memudahkan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara terpisah dan sistematis. Sementara itu, lembaga keuangan dapat memberikan informasi serta akses pembiayaan kepada UMKM yang telah memiliki laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan peluang memperoleh tambahan modal usaha.

Dengan prosedur kerja yang terstruktur serta dukungan dari seluruh mitra, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan. Setiap tahapan kegiatan dirancang untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan dalam menerapkan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, sehingga mampu meningkatkan stabilitas serta transparansi finansial secara berkelanjutan.

Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Cipayang, Kota Depok ini difokuskan pada penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai bagian dari praktik akuntansi untuk meningkatkan stabilitas dan transparansi finansial UMKM. Dari pelaksanaan program yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa capaian sebagai berikut:

Penjelasan terkait pemahaman atas laporan keuangan UMKM :

Pada kegiatan pengabdian ini, tim memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan teoritis yang disertai contoh-contoh praktis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara terpisah dan sistematis, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha. Dengan demikian, diharapkan UMKM mampu meningkatkan stabilitas finansial serta kredibilitas usaha, terutama dalam mengakses sumber pembiayaan di era digitalisasi.

Pengenalan aplikasi untuk pembuatan laporan keuangan UMKM:

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim memperkenalkan aplikasi pencatatan keuangan yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun laptop. Pengenalan aplikasi ini bertujuan untuk mendukung penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha melalui pencatatan transaksi yang lebih terstruktur dan sistematis.

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara lebih mudah, akurat, dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dengan demikian, UMKM dapat beralih dari pencatatan manual menuju pencatatan digital yang lebih praktis dan efisien.

Penerapan aplikasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, sehingga mendukung stabilitas finansial serta meningkatkan kepercayaan pihak

eksternal, khususnya dalam mengakses sumber pembiayaan.

Pendampingan singkat praktik pembuatan laporan keuangan UMKM:

Dalam kegiatan ini, tim memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam melakukan praktik penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan perangkat telepon genggam masing-masing. Pendampingan difokuskan pada penerapan pemisahan keuangan pribadi dan usaha melalui pencatatan transaksi seperti modal, penjualan, dan pembelian secara terpisah dan sistematis hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat langsung dilihat oleh pelaku UMKM.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memahami konsep pencatatan transaksi keuangan berbasis digital yang mudah diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari sesuai dengan jenis usahanya. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam pengambilan keputusan usaha, sehingga mendukung peningkatan stabilitas dan transparansi finansial.

Tempat Waktu

Tempat, Sasaran dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat Kegiatan : Kecamatan Cipayung Kota Depok

Sasaran Kegiatan : Pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung Kota Depok

Hari/Tanggal : Minggu, 29 Mei 2025

Jam 08.00 – 12.00

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih belum menerapkan pemisahan keuangan pribadi dan usaha secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM masih mencampurkan pendapatan usaha dengan kebutuhan pribadi dalam satu pencatatan yang sama.



Gambar 4. 1 Peserta Mengikuti Sesi Pelatihan tentang laporan keuangan



Gambar 4.2 Para Peserta PKM mengenai Laporan Keuangan



Gambar 4. 3 Foto Bersama Tim Pelaksana dan Pelaku UMKM

Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi akuntansi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sebagian besar responden belum memahami pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur dan pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi (Mulyani dkk, 2022). Selain itu, pelaku UMKM cenderung menganggap bahwa usaha skala kecil tidak memerlukan pencatatan keuangan yang detail.

Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan edukasi dan pendampingan terkait pentingnya pemisahan keuangan serta penerapan pencatatan keuangan sederhana. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya penggunaan rekening terpisah antara keuangan usaha dan pribadi, serta mulai diterapkannya pencatatan transaksi secara lebih terstruktur (Yuliani dkk, 2021).

Selain itu, beberapa pelaku usaha mulai menyusun laporan keuangan seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta laporan laba rugi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan menuju arah yang lebih baik dan profesional (Rahmawati dkk, 2022).



Gambar 4. 2 Peserta memberikan pandangan terkait materi yang diberikan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan keuangan pribadi dan usaha memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan transparansi finansial UMKM. Pencampuran keuangan menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat (Hidayat & Putri, 2020).

Dengan diterapkannya pemisahan keuangan, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengontrol arus kas, mengidentifikasi pendapatan dan biaya usaha secara jelas, serta mengevaluasi kinerja usaha secara objektif. Hal ini sejalan dengan konsep teori entitas yang menekankan bahwa usaha harus diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya (Mulyani dkk, 2022).

Dari sisi stabilitas finansial, pemisahan keuangan memungkinkan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran usaha. Dengan demikian, risiko

terjadinya kekurangan kas akibat penggunaan dana usaha untuk kebutuhan pribadi dapat diminimalisir (Prasetyo, 2019).

Sementara itu, dari aspek transparansi, pemisahan keuangan memberikan dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM (Fawaid dkk, 2023).

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan pemisahan keuangan, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi, kurangnya kebiasaan dalam melakukan pencatatan keuangan, serta minimnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan (Rahmawati dkk, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu menerapkan pemisahan keuangan secara konsisten. Dengan demikian, stabilitas dan transparansi finansial UMKM dapat meningkat, sehingga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha secara jangka panjang (Mulyani dkk, 2022).

Secara geografis, Cipayung terletak di pinggiran Kota Depok dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal dengan berbagai jenis usaha seperti perdagangan, jasa, kerajinan, dan kuliner yang menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut terdapat beberapa permasalahan sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah pengelolaan keuangan UMKM yang masih kurang optimal, terutama dalam hal pemisahan antara keuangan pribadi pemilik dan keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampuradukkan transaksi keuangan pribadi dan usaha, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan berkelanjutan.

Selain itu, kondisi lingkungan dan sosial di Cipayung juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan sampah yang mulai membaik berkat inisiatif masyarakat di beberapa RW, namun masih perlu diperkuat agar tidak berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan usaha. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan dan infrastruktur, yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan usaha yang efisien dan profesional.

Dari sisi teknologi dan ilmu pengetahuan, penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan UMKM menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta pencatatan keuangan yang transparan dan terstruktur merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan UMKM di wilayah ini. Dengan dukungan pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi dan metode akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM, diharapkan pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara lebih profesional dan akuntabel.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat mendukung stabilitas dan transparansi finansial usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis situasi diatas, terdapat dua bidang permasalahan prioritas yang sangat mendesak untuk ditangani di Kecamatan Cipayung, yang membutuhkan kepakaran dari bidang ilmu yang berbeda, yaitu:

1. Permasalahan Pengelolaan Keuangan UMKM (Bidang Akuntansi dan Manajemen)
 - a. Ketidakmampuan memisahkan keuangan pribadi dan usaha
Banyak pelaku UMKM di wilayah ini masih mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga pencatatan transaksi menjadi tidak jelas dan laporan keuangan sulit disusun secara akurat.
 - b. Minimnya pemahaman tentang prinsip akuntansi dan manajemen keuangan
Pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan pentingnya transparansi finansial untuk mendukung pengambilan keputusan dan akses pembiayaan.
 - c. Dampak negatif terhadap stabilitas dan keberlanjutan usaha
Pengelolaan keuangan yang tidak terpisah dan tidak transparan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan finansial, kesulitan dalam pengendalian biaya, serta menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha.
2. Permasalahan Sosial dan Lingkungan (Bidang Ilmu Sosial dan Lingkungan)
 - a. Tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Bojong Pondok Terong menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, infrastruktur, dan fasilitas umum, yang berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat dan kelangsungan usaha.
 - b. Pengelolaan lingkungan dan sampah
Meskipun sudah ada inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berhasil mengurangi produksi sampah secara signifikan, pengelolaan lingkungan secara menyeluruh masih perlu diperkuat agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.
 - c. Kualitas hidup masyarakat dan permukiman
Beberapa kawasan di wilayah ini, seperti permukiman Situ Citayam, masih menghadapi masalah kekumuhan dan kualitas hidup yang sedang, sehingga perlu intervensi sosial dan teknis untuk meningkatkan kondisi tersebut.

Permasalahan diatas sangat relevan dan mendesak untuk segera ditangani karena berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta penerapan prinsip akuntansi yang tepat. Selain itu, kegiatan ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dengan pendekatan multidisipliner dan partisipatif, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha pada pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok
Banyak pelaku UMKM yang masih mencampuradukkan pengeluaran dan pemasukan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga menyulitkan pencatatan dan pengelolaan keuangan yang akurat.
- b. Minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar dalam pengelolaan

keuangan UMKM

Pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan keuangan yang terstruktur dan transparan, sehingga laporan keuangan yang disusun kurang dapat dipercaya dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- c. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan UMKM
Ketidakjelasan dalam pencatatan keuangan menyebabkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, yang berpotensi menurunkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait seperti kreditor, investor, maupun konsumen.
- d. Dampak negatif terhadap stabilitas dan keberlanjutan usaha UMKM
Pengelolaan keuangan yang tidak terpisah dan tidak terstruktur dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, kesulitan dalam pengendalian biaya, serta hambatan dalam pengembangan usaha jangka panjang.
- e. Keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan dan akuntansi bagi UMKM di wilayah tersebut

Kurangnya program edukasi dan pelatihan yang memadai mengakibatkan pelaku UMKM belum optimal dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan pembahasan diatas, tujuan yang akan dicapai dalam pengabdian ini yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi yang dapat diterapkan secara langsung oleh pelaku UMKM.
- c. Mendorong stabilitas dan transparansi finansial UMKM melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat, sehingga mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha.
- d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan UMKM sehingga dapat memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak terkait, termasuk konsumen dan lembaga keuangan.
- e. Membuka minat dan motivasi pelaku UMKM untuk menerapkan pembukuan dan pelaporan keuangan secara rutin sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.

Analisis Situasi Permasalahan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional maupun daerah, termasuk di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, dalam praktik pengelolaan usaha, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi (Sari dkk, 2021).

Salah satu permasalahan utama yang sering ditemukan adalah belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan kedua jenis keuangan tersebut dalam satu sumber dana maupun pencatatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi akuntansi, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya laporan keuangan, serta persepsi bahwa pencatatan keuangan bukan merupakan hal yang krusial dalam menjalankan usaha (Mulyani dkk, 2022).

Pencampuran keuangan pribadi dan usaha berdampak negatif terhadap stabilitas finansial UMKM. Pelaku usaha menjadi kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk dalam menghitung laba atau rugi usaha secara akurat. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan rendahnya transparansi keuangan, sehingga menyulitkan dalam melakukan evaluasi kinerja usaha dan pengambilan keputusan yang tepat (Hidayat & Putri, 2020).

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas pencatatan keuangan pada UMKM. Sebagian

besar pelaku usaha masih melakukan pencatatan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Praktik ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan serta menghambat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Yuliani dkk, 2021).

Tidak adanya pemisahan keuangan juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan eksternal. Lembaga keuangan seperti bank dan investor umumnya mensyaratkan laporan keuangan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya. Ketika pelaku UMKM tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, maka peluang untuk memperoleh tambahan modal menjadi semakin kecil (Prasetyo, 2019).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan melalui penggunaan aplikasi akuntansi sederhana. Namun, keterbatasan pemahaman teknologi serta kurangnya pendampingan menjadi hambatan dalam penerapannya (Rahmawati dkk, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Hal ini berdampak langsung terhadap stabilitas dan transparansi finansial, serta menghambat pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi akuntansi serta mendorong penerapan pengelolaan keuangan yang lebih profesional (Mulyani dkk, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemisahan keuangan pribadi dan usaha pada UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi akuntansi serta kurangnya edukasi terkait pengelolaan keuangan usaha.
- b. Praktik pengelolaan keuangan pada UMKM masih banyak yang mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan pemisahan keuangan meliputi kurangnya pengetahuan akuntansi, minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

Pemisahan keuangan pribadi dan usaha memiliki implikasi positif terhadap stabilitas finansial UMKM, karena membantu dalam pengelolaan arus kas serta menghindari penggunaan dana usaha untuk kepentingan pribadi.

Dari sisi transparansi, pemisahan keuangan memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan pihak eksternal seperti lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, pemisahan keuangan pribadi dan usaha merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM, serta mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Pernyataan Apresiasi (jika ada)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM disarankan untuk mulai menerapkan pemisahan keuangan pribadi dan

usaha secara konsisten, misalnya dengan menggunakan rekening terpisah dan melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Hal ini penting untuk meningkatkan stabilitas dan transparansi keuangan usaha

- b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan pelatihan mengenai literasi akuntansi bagi pelaku UMKM. Pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan agar pelaku usaha mampu menerapkan pencatatan keuangan yang baik .
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel yang lebih luas, seperti pengaruh digitalisasi akuntansi atau penggunaan aplikasi keuangan terhadap kinerja UMKM, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif .
- d. Bagi Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan secara baik dan transparan, serta memberikan edukasi terkait pentingnya laporan keuangan dalam pengajuan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Koperasi dan UKM Kota Depok. (2020). Profil UMKM di Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Depok: Dinas Koperasi dan UKM.
- Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, T., & Putri, R. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- <https://depokkota.bps.go.id/id/publication?keyword=Kecamatan+Cipayung&sort=latest>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2014). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana. Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S., dkk. (2022). Literasi Akuntansi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Prasetyo, A. (2019). Akses Pembiayaan UMKM melalui Laporan Keuangan. *Jurnal Manajemen*.
- Pratiwi, D., & Hidayat, T. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi UMKM pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 45–56.
- Rahmawati, D., dkk. (2022). Digitalisasi Akuntansi pada UMKM. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*.
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2017). Implementasi SAK ETAP dan Kualitas laporan keuangan UMKM terkait akses modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Sari, N., dkk. (2021). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Mudah Memahami Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yuliana, S. (2017). Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 123–135.